

KEPEMILIKAN PERENCANAAN KEUANGAN HARI TUA PADA PEKERJA KOTA BOGOR

Rizky Amelia, Hartoyo, dan Budi Suharjo

Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor

rizkymelamelia1409@gmail.com, hartoyo@ipb.ac.id, dan
budi.suharjo2010@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the influence of attitude toward behavior, subjective norms, and perceived behavioral control on Bogor's employee. This study is aims too to analyze the demography characteristic of Bogor's employee who have retirement planning. This study was conducted on 97 Bogor's employee and was conducted in August until October 2016. The results of logistic regression showed that the indicators of subjective norms and perceived behavioral control have positive effect on financial retirement planning to Bogor's employee. Research also showed that ownership of financial retirement planning tend to be owned by the city of Bogor's employee who have more than one number of dependents, aged over 30 years old, married, and earning over nine million per month.

Keywords: retirement planning, theory of planned behavior, employee in Bogor

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan yang merupakan indikator dari *Theory of Planned Behavior* terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor. Penelitian ini juga ingin menganalisis karakteristik demografi dari pekerja Kota Bogor yang memiliki perencanaan keuangan untuk hari tuanya. Penelitian ini dilakukan pada 97 pekerja Kota Bogor dan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2016. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa indikator norma-norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor. Penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan perencanaan keuangan hari tua cenderung dimiliki oleh pekerja Kota Bogor yang memiliki jumlah tanggungan lebih dari satu, berusia di atas 30 tahun, sudah menikah, dan berpenghasilan di atas sembilan juta per bulan.

Kata kunci: perencanaan keuangan hari tua, *theory of planned behavior*, pekerja Kota Bogor

PENDAHULUAN

Kepemilikan perencanaan keuangan hari tua menjadi suatu isu yang menarik. Individu pada masa tua memiliki kebutuhan yang tetap harus dipenuhi. Banyak ahli memperkirakan bahwa individu pada masa pensiun membutuhkan 75 sampai 90 persen pendapatan prapensiun untuk tetap memiliki kehidupan yang nyaman (Garman dan Forgue 1994). Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI memperkirakan pada tahun 2014 rata-rata usia harapan penduduk Indonesia mencapai 72 tahun. Artinya, jika individu pensiun pada usia 56 tahun, maka ia memiliki 16 tahun pada masa tuanya tanpa pendapatan dari pekerjaan.

Di Amerika, sebagian besar warga pada usia tua hanya mengandalkan jaminan sosial sebagai pendapatan utama mereka (Keown 2010). Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU No 40 Tahun 2004). Jaminan sosial sebenarnya hanya merupakan perlindungan dasar bagi individu karena manfaat yang diberikan tidak akan mampu memberikan kehidupan yang layak di masa pensiun (Keown 2010). Akibatnya, pada usia pensiun tersebut masih banyak individu yang bekerja, tidak hanya menikmati apa yang telah mereka capai dan miliki. Hasil survei di Indonesia menemukan bahwa 36.14 persen lansia di Indonesia masih bekerja (BPS 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa, individu yang telah lanjut usia masih dibutuhkan kemampuannya atau justru masih membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masa tua tanpa pendapatan lagi memerlukan perencanaan keuangan dari setiap individu. Hal tersebut mengingat ia tetap memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Garman dan Fogue (1994) menyebutkan bahwa waktu yang tepat untuk memulai dan menyiapkan masa tua adalah saat individu masih berada di masa dewasa awal. Perencanaan pensiun dapat dilakukan dengan menyisihkan sebagian aset dalam bentuk tabungan, berinvestasi, membeli asuransi, atau mengikuti program dana pensiun (Senduk 1999). Namun, meskipun perencanaan pensiun merupakan hal yang bermanfaat, sedikit individu yang termotivasi untuk melakukan perencanaan pensiun untuk menunjang kesejahteraan di masa tua (Ekerdt *et al.*, 2001).

Selnow (2004) dalam Brucker dan Leppel (2013) mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa kebanyakan orang tidak merencanakan dengan baik masa pensiunya. Pertama dana pensiun yang dibayarkan masih jauh masanya. Selain itu, perencanaan pensiun membutuhkan dana di mana dana untuk simpanan tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Akibatnya, individu gagal dalam melakukan perencanaan pensiun. Di Kota Bogor terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa masih sedikit pensiunan yang merasa sangat puas dengan keadaan ekonomi setelah pensiun (Sulastris dan Hartoyo, 2014). Sulastris dan Hartoyo (2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa pensiunan tersebut ditemukan melakukan strategi nafkah ganda untuk mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga sehingga fungsi keluarga tetap bisa berjalan. Artinya, terdapat kebutuhan akan sumberdaya yang tidak mampu direncanakan oleh pensiunan sebelum memasuki masa pensiunnya. Kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor selanjutnya diprediksi dengan menggunakan *theory of planned behavior* (TPB).

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa niat perilaku individu untuk melakukan merupakan fungsi dari sikap dan norma subjektif (Fishbein dan Ajzen 1975). TPB berpendapat bahwa sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan merupakan indikator penentu dari niat perilaku dan perilaku aktual. Ajzen (2005) mengartikan niat sebagai disposisi tingkah laku, yang akan diwujudkan dalam bentuk tindakan saat terdapat waktu dan kesempatan yang tepat. Niat juga diartikan sebagai deklarasi internal untuk bertindak atau melakukan sesuatu (Hogg dan Vaughan 2005). Perilaku kepemilikan perencanaan keuangan hari tua didefinisikan sebagai intensi yang dipengaruhi oleh 3 indikator TPB, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Sikap mempengaruhi perilaku seseorang (Ajzen 1991). Sikap adalah disposisi untuk berespon secara *favorable* atau *unfavorable* terhadap benda, orang, institusi, atau kejadian (Ajzen 2005). Sikap diartikan sebagai produk dari kepercayaan individu tentang tingkah laku yang menjadi target dan evaluasi yang dihasilkan dari kepercayaan

atas tingkah laku tersebut (Hogg dan Vaughan 2005). Artinya, jika individu percaya bahwa dengan memiliki sikap yang positif maka ia akan menghasilkan menghasilkan *outcome* yang positif. TPB juga menganggap bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh norma-norma subjektif (Ajzen 1991). Norma-norma subjektif terdiri dari keyakinan seseorang tentang persepsi orang lain tentang keharusan ia melakukan suatu perilaku. Hogg dan Vaughan (2005) berpandangan bahwa norma-norma subyektif adalah produk dari kepercayaan individu tentang persepsi yang dimiliki orang lain. Indikator selanjutnya adalah bahwa niat perilaku seseorang dapat diprediksi oleh kontrol yang dirasakannya dalam melakukan tugas yang diinginkan (Ajzen 1991). Kontrol yang dirasakan adalah ukuran sejauh mana individu percaya tentang mudah atau sulitnya menampilkan tingkah laku tertentu (Hogg dan Vaughan 2005).

Berdasarkan pemaparan tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *theory of planned behavior* terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk menganalisis karakteristik demografi pekerja Kota Bogor yang memiliki perencanaan keuangan hari tua.

KAJIAN TEORI

Perencanaan Keuangan Hari Tua. Hari tua erat kaitannya dengan masa pensiun, karena umumnya hari tua terjadi pada masa pensiun individu. Altfest (2007) menjelaskan beberapa konsep terkait pensiun. Pensiun erat kaitannya dengan anuitas dan jaminan sosial yang disiapkan untuk menghadapi masa pensiun (Altfest 2007). Literatur terbaru memandang pensiun merupakan proses (Marshall *et al.*, 2001; Reitzes dan Mutran 2004), dengan persiapan yang dilakukan sejak awal. Banyak yang merekomendasikan individu untuk memulai persiapan pensiun jauh sebelum mereka benar-benar meninggalkan pekerjaannya (Anderson *et al.*, 2000). Kebutuhan yang jelas untuk melakukan persiapan keuangan hari tua baru-baru ini dibuktikan dalam sebuah metaanalisis oleh Topa *et al.*, (2009) yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara perilaku perencanaan pensiun dan kepuasan pensiun. Bukti menunjukkan bahwa persiapan pensiun meningkatkan penyesuaian yang lebih baik untuk masa pensiun (Ebersole dan Hess 1990; Mutran *et al.*, 1997; Noone *et al.*, 2009). Sumber penghasilan pada saat memasuki masa tua beragam asalnya. Sumber tersebut dapat diperoleh dari pemerintah, dari pensiun perusahaan, tabungan dan aset pribadi yang dimiliki, atau dari usaha keluarga dan warisan yang mungkin dimiliki oleh individu.

Peraturan tentang Program Pensiun. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang membahas masa pensiun. Beberapa peraturan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 (PP No. 45 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 (PP No. 46 Tahun 2015). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan berkewajiban memberikan jaminan atau manfaat pensiun yang diberikan sekaligus saat pensiun (UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 167). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa Indonesia telah menyelenggarakan secara nasional sistem jaminan sosial nasional berupa jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kedua jaminan tersebut adalah dikelola oleh 4 perusahaan, antara lain Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK sekarang BPJS Ketenagakerjaan);

Perusahaan Perseroan Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES sekarang BPJS Kesehatan).

Peraturan terakhir yang menjadikan jaminan hari tua mulai dilakukan oleh banyak perusahaan dan masyarakat adalah PP No. 45 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2016. PP No. 45 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai Jaminan Pensiun. Peraturan ini mengatur bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. keberadaan jaminan sosial di Indonesia (UU No. 40 Tahun 2004) di mana program penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah. PP No. 46 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai Jaminan Hari Tua. Peraturan ini mengatur bahwa setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan antara Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua adalah frekuensi penerimaannya di mana Jaminan Pensiun hanya diterima sekali sedangkan Jaminan Hari Tua dapat diatur frekuensi penerimaannya saat pensiun.

Theory of Planned Behavior (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa niat perilaku individu merupakan fungsi dari sikap dan norma subjektif (Fishbein dan Ajzen 1975). TPB berpendapat bahwa sikap, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan merupakan penentu utama dari niat perilaku dan perilaku aktual (Ajzen 1991). Niat diasumsikan kondisi yang diperlukan untuk tindakan sukarela, yang mungkin dipicu oleh sikap individu, tekanan sosial, dan kesempatan yang dirasakan atau obstacles. Dengan demikian, ada hubungan kuat antara niat dan tindakan (Ajzen 1991). TPB telah digunakan untuk memprediksi pensiun dini (Van Dam *et al.*, 2009) namun, belum ada yang meneliti mengenai perencanaan keuangan hari tua. TPB telah berhasil diterapkan untuk perilaku seperti diet (Hagger dan Chatzisarantis 2005) dan olahraga (Rivis dan Sheeran 2003) yang tidak hanya membutuhkan usaha yang lebih tetapi juga memiliki manfaat tertunda, yang terutama karakteristik perilaku dalam domain perencanaan.

Ada beberapa definisi niat (*intention*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Niat adalah disposisi tingkah laku, yang hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat, akan diwujudkan dalam bentuk tindakan (Ajzen 2005). Niat juga diartikan sebagai deklarasi internal untuk bertindak atau melakukan sesuatu (Hogg dan Vaughan 2005). Berdasarkan TPB, sikap mempengaruhi perilaku seseorang (Ajzen 1991). Sikap adalah disposisi untuk berespon secara *favorable* atau *unfavorable* terhadap benda, orang, institusi atau kejadian (Ajzen 2005). Sikap diartikan sebagai produk dari keyakinan individu tentang tingkah laku yang menjadi target dan bagaimana keyakinan ini dievaluasi (Hogg dan Vaughan 2005). Untuk menentukan sikap kepemilikan kartu kredit, studi sebelumnya menggunakan tiga faktor sikap, yakni sikap umum terhadap kartu kredit, sikap terhadap toleransi risiko, dan perencanaan (Hazembuller *et al.*, 2007). Sikap terhadap tingkah laku dapat diukur dengan melihat kekuatan *behavioral beliefs* dan evaluasi terhadap *outcome* yang diyakini. Artinya, jika individu percaya bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan *outcome* yang positif, maka ia akan memiliki sikap tersebut.

TPB juga menyebutkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh norma-norma subjektif (Ajzen 1991). Norma-norma subjektif terdiri dari keyakinan seseorang tentang apakah orang lain berpikir bahwa ia harus melakukan suatu perilaku (Ajzen 2005). Hogg dan Vaughan (2005) berpandangan bahwa norma-norma subjektif adalah produk dari persepsi individu tentang *beliefs* yang dimiliki orang lain. Norma-norma sosial mendikte gaya hidup dan harapan orang lain hingga mempengaruhi keputusan pembeliannya (Conner dan Armitage 1998). Pada penggunaan kartu kredit, ketika orang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, mereka lebih cenderung terdorong untuk membeli sesuatu yang mudah dilakukan dengan kartu kredit (Roberts dan Jones 2001). Norma-norma subjektif diukur dengan melihat *normative belief* dan *motivation to comply*. *Normative belief* berhubungan dengan persepsi subjek terhadap sikap orang lain tentang tingkah laku yang diinginkan, sedangkan *motivation to comply* berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki orang lain terhadap subjek yang bersangkutan.

TPB juga menyebutkan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi oleh kontrol yang dirasakannya dalam melakukan tugas yang diinginkan (Ajzen, 1991). Kontrol dicapai melalui sumber daya yang relevan dan peluang untuk melakukan perilaku tertentu (Madden *et al.*, 1992). Kontrol perilaku yang dirasakan adalah ukuran sejauh mana individu percaya tentang mudah atau sulitnya menampilkan tingkah laku tertentu (Hogg dan Vaughan 2005). Kontrol perilaku yang dirasakan diukur dengan melihat *control belief* dan *perceived facilitation*. Dengan kata lain, semakin besar *control belief* mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki serta semakin kecil persepsi tentang hambatan yang dimiliki, maka semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan yang dimiliki individu untuk melakukan perilaku tertentu.

METODE

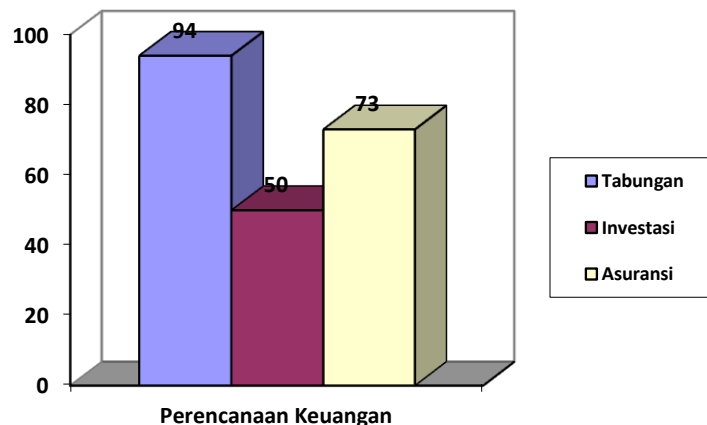
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain *cross sectional study*. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan Kota Bogor adalah kota terpadat kedua di Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2016. Populasi pada penelitian ini adalah tenaga kerja Kota Bogor yang memiliki penghasilan tetap. Populasi tenaga kerja Kota Bogor adalah 346.727 orang (BPS Jawa Barat 2015), sehingga dengan menggunakan rumus Slovin (eror 10%) maka contoh kemudian diperoleh sejumlah adalah 100 responden.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan alat bantu kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif yang digunakan adalah mean dan frekuensi. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan mengenai karakteristik responden, *sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif*, dan *kontrol perilaku yang dirasakan*, dan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja di Kota Bogor. Analisis statistik inferensia yang digunakan adalah regresi logistik binary di mana hasil skor dari variabel terikat akan dikategorikan ke dalam dua kategori. Selain itu, dilakukan pula analisis korelasi untuk melihat karakteristik demografi pekerja Kota Bogor yang memiliki perencanaan keuangan hari tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden. Responden pada penelitian ini memiliki beragam karakteristik. Dari 100 responden yang dimiliki, data yang bisa digunakan dengan baik adalah 97 responden. Dari 97 responden tersebut, sebanyak 57.73 persen responden adalah perempuan dan sebanyak 66.00 persen responden berada pada kategori usia 20-29 tahun. Tujuh dari 10 responden berpendidikan tamat S1. Sebanyak 58.8 persen dari responden merupakan responden belum menikah. Dari 97 responden dengan penghasilan minimal adalah Rp2.000.000,- dan maksimal adalah Rp45.000.000,-, empat dari sepuluhnya memiliki pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari-hari pada rentang Rp1.250.000,- sampai dengan Rp2.500.000,-. Sebanyak 6 dari 10 responden memiliki jumlah tanggungan 1 orang atau tidak ada dan 4 dari 10 responden lainnya memiliki tanggungan ≥ 2 orang.

Kepemilikan Perencanaan Keuangan Hari Tua. Perencanaan keuangan untuk masa tua bisa dilakukan dengan berbagai macam, seperti mengikuti asuransi, memiliki tabungan, atau memiliki investasi. Pada penelitian ini dari 97 responden terdapat 21.65 persen responden yang mengaku belum memiliki perencanaan keuangan hari tua. Namun, meskipun demikian, responden mengakui memiliki tabungan, investasi, atau asuransi sebagai aset bagi mereka. Tabungan dimiliki oleh hampir seluruh responden (96.91%). Aset atau simpanan lainnya berupa investasi dimiliki oleh separuh (51.55%) responden, dan aset atau simpanan dengan memiliki asuransi dimiliki oleh tiga perempat (75.26%) responden.



Gambar 5. Sebaran aset atau simpanan responden berdasarkan jenisnya, yakni tabungan, investasi, dan asuransi (n=97)

Pada responden yang memiliki tabungan, 7 dari 10 responden mengaku menabung setiap bulan. Rata-rata uang yang mereka sisihkan untuk menabung setiap bulan adalah Rp500.000,- sampai dengan Rp1.000.000,-. Alasan terbanyak responden menabung adalah karena tabungan membuat mereka lebih aman saat hari tua dan tabungan mudah untuk diambil. Dari responden yang memiliki investasi, 2 dari 10 orang mengaku memiliki investasi berupa properti atau emas. Rata-rata persentase uang setiap bulan yang mereka sisihkan untuk melakukan investasi adalah 1-10 persen dari pendapatan per bulan. Sebanyak 15 dari 100 responden mengaku alasan berinvestasi adalah karena senang melakukan investasi. Selanjutnya, untuk responden yang memiliki asuransi, 3 dari 10 responden mengaku memiliki asuransi kesehatan dan hanya 2 dari 100 responden yang mengaku memiliki asuransi jaminan hari tua. Adapun

uang yang disisihkan oleh separuh responden (60.8%) setiap bulannya untuk membayar asuransi adalah di bawah Rp1.000.000,-.

Theory of Planned Behavior. Sikap terhadap perilaku (ATB) merupakan salah satu indikator yang diduga dapat membentuk perilaku memiliki perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor. Sebanyak 48.5 persen responden sudah meyakini dengan baik akan sikap memiliki perencanaan keuangan hari tua. Mereka percaya bahwa melakukan persiapan keuangan hari tua perlu untuk dilakukan walaupun hal tersebut dapat menjadi beban pengeluaran mereka setiap bulannya. Mereka juga mempercayai bahwa persiapan keuangan hari tua membuat individu tidak menyusahkan anak atau anggota keluarga lain dan dengan melakukan persiapan keuangan hari tua, individu akan hidup nyaman di masa tua.

Norma-norma subjektif (SN) merupakan indikator kedua yang diduga dapat membentuk perilaku memiliki perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor. Sebanyak 58.8 persen responden meyakini bahwa lingkungan di sekitarnya juga menyarankan mereka untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua. Keluarga mereka berpikir bahwa persiapan keuangan hari tua perlu dimiliki sejak saat ini dan saran dari keluarga tersebut merupakan hal penting yang perlu dilakukan. Teman-teman mereka yang bekerja, juga menyarankan untuk memiliki persiapan keuangan hari tua sejak saat ini dan hal tersebut menjadikan mereka ikut memiliki perencanaan keuangan hari tua.

Kontrol perilaku yang dirasakan (PBC) merupakan indikator ketiga yang diduga dapat membentuk perilaku kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor. Sebanyak 43.3 persen responden meyakini bahwa memiliki sumber daya dan kesempatan merupakan faktor pendukung dalam melakukan perencanaan keuangan hari tua. Mereka akan melakukan persiapan keuangan hari tua jika pemerintah mengatur tentang hal ini dan mereka juga mengetahui bahwa pemerintah mewajibkan setiap individu (pekerja formal dan non formal) untuk memiliki persiapan keuangan hari tua. Mereka juga mengakui bahwa akan mudah bagi mereka memiliki persiapan keuangan hari tua jika terdapat informasi yang jelas untuk memilikinya. Di sisi lain, persiapan keuangan hari tua diyakini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan menabung secara konvensional sampai memiliki program di lembaga keuangan.

Karakteristik Demografi dengan Kepemilikan Perencanaan Keuangan Hari Tua.

Kepemilikan perencanaan keuangan hari tua dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu tersebut adalah karakteristik demografi individu. Hasil uji korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antara karakteristik demografi dengan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. Hasil uji menemukan bahwa usia, status pernikahan, jumlah tanggungan, dan pendapatan merupakan karakteristik demografi individu yang memiliki hubungan terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor (Tabel 1). Jumlah tanggungan individu ditemukan berhubungan signifikan ($p < 0.05$), di mana jumlah tanggungan yang semakin banyak akan cenderung membuat pekerja Kota Bogor memiliki perencanaan keuangan hari tua.

Tabel 7. Output korelasi karakteristik demografi dengan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua (n=97)

		Age	Educatio n	Marita l status	Liabilitie s member	Occupatio n	Incom e	Retiremen t planning
Age	Pearson Correlatio n	1						
	Sig. (2- tailed)							
	N	97						
Education	Pearson Correlatio n	0.067	1					
	Sig. (2- tailed)	0.515						
	N	97	97					
Marital status	Pearson Correlatio n	0.611	-0.064	1				
	Sig. (2- tailed)	0	0.531					
	N	97	97	97				
Liabilities member	Pearson Correlatio n	0.601	0.085	0.534	1			
	Sig. (2- tailed)	0	0.408	0				
	N	97	97	97	97			
Occupatio n	Pearson Correlatio n	0.064	-0.183	0.116	0.016	1		
	Sig. (2- tailed)	0.537	0.073	0.259	0.875			
	N	97	97	97	97	97		
Income	Pearson Correlatio n	0.43	0.039	0.319	0.341	0.027	1	
	Sig. (2- tailed)	0	0.701	0.001	0.001	0.79		
	N	97	97	97	97	97	97	
Retirement planning	Pearson Correlatio n	.197*	0.062	.189*	.212**	-0.064	.177*	1
	Sig. (2- tailed)	0.053	0.543	0.064	0.037	0.53	0.082	
	N	97	97	97	97	97	97	97

*Significant at $p < 0.1$ **Significant at $p < 0.05$

Faktor demografi selanjutnya yang memiliki hubungan yang positif terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pekerja Kota Bogor adalah usia ($p < 0.10$). Mereka yang semakin tua cenderung akan memiliki perencanaan keuangan hari tua. Status pernikahan pekerja Kota Bogor ditemukan memiliki hubungan dengan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pekerja Kota Bogor ($p < 0.10$) di mana mereka yang sudah menikah diketahui akan memiliki perencanaan keuangan hari tua. Faktor demografi lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan perencanaan

keuangan hari tua adalah pendapatan ($p < 0.10$). Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh pekerja Kota Bogor, maka akan semakin besar kemungkinan mereka untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor.

Theory of Planned Behavior terhadap Kepemilikan Perencanaan Keuangan Hari Tua. Kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja Kota Bogor ditemukan dipengaruhi oleh norma-norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Hasil tersebut disajikan pada Tabel 2. Model pengaruh dari norma-norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pekerja Kota Bogor diketahui merupakan model yang memiliki tingkat prediksi sebesar 12.7 persen (*Nagelkerke R Square* at 0.127). Artinya, masih terdapat faktor lainnya (87.3%) yang berpengaruh dan tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 8. Pengaruh *theory of planned behavior* terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua

	Memiliki PKHT* (1=ya; 0=tidak)		
	B	Sig,	Exp(B)
Konstanta	-2.30	0.070	0.10
Norma-norma subjektif	0.46	0.056	1.58
Kontrol perilaku yang dirasakan	0.53	0.030	1.70
<i>Chi-square</i>		8.366	
<i>Significant</i>		0.015	
<i>Nagelkerke R Square</i>		0.127	

*PKHT= Perencanaan keuangan hari tua

Norma-norma subjektif berpengaruh 1.58 kali (Tabel 2) terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pekerja Kota Bogor (*significant* at 0.056). Keyakinan individu pada persepsi keluarga mengenai pentingnya memiliki perencanaan keuangan hari tua menjadi faktor yang mempengaruhi pekerja untuk mau memiliki perencanaan keuangan hari tua. Sebanyak 9 dari 10 pekerja Kota Bogor memiliki perencanaan keuangan hari tua dan yakin bahwa keluarga juga berkeyakinan perencanaan keuangan hari tua penting untuk dilakukan sejak saat ini (Tabel 2).

Tabel 9. Sebaran sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berdasarkan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua (n=97)

Indikator		Kepemilikan PKHT (%)		Total (%)
		Ya	Tidak	
Sikap terhadap perilaku	Atas rata-rata	83.00	17.00	100.00
	Bawah rata-rata	74.00	26.00	100.00
Norma-norma subjektif	Atas rata-rata	86.00	14.00	100.00
	Bawah rata-rata	67.75	32.50	100.00
Kontrol perilaku yang dirasakan	Atas rata-rata	81.40	18.60	100.00
	Bawah rata-rata	75.90	24.10	100.00

Indikator lainnya pada *theory of planned behavior* yang mempengaruhi kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pekerja Kota Bogor adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku yang dirasakan oleh pekerja Kota Bogor berpengaruh 1.70 kali (Tabel 2) terhadap perencanaan keuangan hari tua (*significant at 0.030*). Kontrol perilaku yang dirasakan yang dimaksud adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada setiap pekerja (baik formal ataupun nonformal). Sebanyak 7 dari 10 pekerja Kota Bogor memiliki perencanaan keuangan hari tua dan yakin bahwa pemerintah telah mengatur dan mewajibkan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua (Tabel 3).

Tabel 10. Output korelasi indikator Theory of Planned Behavior hari tua (n=97)

		Sikap terhadap perilaku	Norma-norma subjektif	Kontrol perilaku yang dirasakan
Sikap terhadap perilaku	Pearson Correlation	1		
	Sig. (2-tailed)			
	N	97		
Norma-norma subjektif	Pearson Correlation	0.05	1	
	Sig. (2-tailed)	0.627		
	N	97	97	
Kontrol perilaku yang dirasakan	Pearson Correlation	0.302**	0.004	1
	Sig. (2-tailed)	0.003	0.966	
	N	97	97	97

*Significant at $p < 0.05$

**Significant at $p < 0.01$

Uji korelasi juga digunakan untuk melihat hubungan indikator-indikator *theory of planned behavior* lainnya (Tabel 4). Uji ini dilakukan mengingat tidak terlihatnya pengaruh dari indikator sikap terhadap perilaku terhadap kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. Hasil uji menemukan bahwa, sikap terhadap perilaku memiliki hubungan yang signifikan dengan indikator kontrol perilaku yang dirasakan ($p < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin individu tidak ingin menyusahkan keluarganya di masa mendatang, maka individu tersebut akan semakin meyakini regulasi pemerintah untuk mewajibkan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pada pekerja (baik untuk pekerja formal ataupun nonformal).

Pembahasan. Kepemilikan perencanaan keuangan hari tua menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Masa tua merupakan masa yang pasti akan dihadapi oleh seluruh individu. Pekerja, umumnya pada masa ini tidak akan memiliki penghasilan lagi. Artinya, mereka memerlukan perencanaan perencanaan keuangan hari tua untuk mampu menghadapi masa tersebut. Di beberapa negara, seperti Canada ditemukan bahwa perencanaan pensiun sangat terkait dengan melek finansial di mana mereka yang melek finansial 10 persen lebih mungkin untuk memiliki tabungan pensiun (Boisclair *et al.*, 2014).

Karakteristik seperti status ekonomi yang rendah sehingga hanya mengandalkan jaminan sosial bukan pertanda baik untuk kesiapan pensiun pada mereka yang tidak memiliki perencanaan keuangan hari tua (Brucker dan Leppel, 2013). Individu yang mengandalkan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup saat tua, dalam banyak kasus diindikasikan karena tidak adanya penawaran rencana pensiun yang diberikan

oleh perusahaan (Brucker dan Leppel, 2013). Hal berbeda ditemukan di Malaysia. Sebagian besar karyawan di Malaysia ditemukan tidak memikirkan apapun untuk masa pensiun (Brahmana *et al.*, 2014). Brahmana *et al.*, (2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa alasan pekerja Malaysia tidak memikirkan perencanaan keuangan adalah karena kurangnya pengetahuan mereka tentang keuangan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel TPB menjadi salah satu faktor pengaruh kepemilikan perencanaan keuangan hari tua pekerja Kota Bogor. Kontrol perilaku yang dirasakan serta norma-norma subjektif diketahui mempengaruhi pekerja dalam memiliki perencanaan keuangan hari tua. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Griffin *et al.*, (2012). Griffin *et al.*, (2012) mendukung penggunaan variabel TPB untuk menjelaskan mengenai perencanaan pensiun. Bahkan, Griffin *et al.*, (2012) menemukan bahwa sikap terhadap perilaku, kontrol terhadap perilaku, norma-norma subjektif, mempengaruhi pekerja terlibat dalam perencanaan pensiun. Davis dan Hustvedt (2012) juga mengemukakan bahwa kontrol perilaku adalah variabel yang paling penting dalam memprediksi perilaku menabung pada seseorang.

Kontrol perilaku yang dirasakan pada penelitian ini menekankan pada ketersediaan regulasi yang dibuat oleh pemerintah mengenai kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. Ketersediaan regulasi ini menjadi hal penting dalam membentuk perilaku kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. Di Indonesia, regulasi mengenai perencanaan keuangan hari tua telah diatur dalam beberapa aturan, yakni Undang Undang Jaminan Sosial (UU No 40 Tahun 2004). UU No 4 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program yang dikelola oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. UU tersebut juga diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 45 dan No. 46 Tahun 2015 yang mewajibkan seluruh tenaga kerja untuk memiliki jaminan sosial berupa program jaminan hari tua dan pensiun. Namun, kepesertaan tenaga kerja akan program pensiun tersebut masih tercatat hanya 14,5 persen dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia (diolah dari Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen 2014).

Sedikitnya tenaga kerja yang memiliki perencanaan keuangan hari tua tersebut menjadi tolak ukur bahwa ternyata regulasi yang ada belum mampu memaksa pekerja memiliki perencanaan keuangan hari tua. Regulasi tersebut juga mungkin belum mampu menyadarkan pemberi kerja atau perusahaan sebagai pihak yang berkewajiban dalam memfasilitasi pekerjaannya melakukan perencanaan keuangan hari tua. Lebih lanjut Brucker dan Leppel (2013) menambahkan tanpa adanya fasilitas dari perusahaan, perencanaan untuk masa pensiun cenderung jauh lebih sulit dilakukan oleh para pekerja. Padahal, akses yang lebih besar terhadap perencanaan masa tua yang dapat disediakan oleh perusahaan akan membantu kesiapan untuk masa tua pada seseorang (Brucker dan Leppel, 2013).

Pemerintah masih perlu membuat regulasi lebih lanjut mengenai kewajiban pekerja dalam memiliki perencanaan keuangan hari tua. Regulasi yang diperlukan tersebut tidak sekedar mengatur mengenai kewajiban dan hak yang akan diperoleh, namun juga mampu menjamin atas perencanaan keuangan hari tua, namun juga mampu memberikan gambaran secara detil. Hal tersebut dikarenakan bisa jadi regulasi yang ada tidak mampu menyadarkan pekerja bahwa perencanaan keuangan hari tua adalah hal penting yang harus mereka perhatikan. Agnew *et al.*, (2013) mengemukakan bahwa di Australia, meningkatnya kontribusi perusahaan dalam ikut serta jaminan hari tua atau jaminan pensiun mendorong banyak orang Australia merasa mereka telah menaati aturan pemerintah. Lebih lanjut, Agnew *et al.*, (2013) menyebutkan hal ini membuat mereka merasa akan memiliki masa tua yang aman dengan hanya jaminan sosial

tersebut sehingga perencanaan keuangan hari tua tidak menjadi fokus perhatian dari perencanaan keuangan individu (Agnew *et al.*, 2013). Padahal, jaminan sosial sebenarnya hanya merupakan perlindungan dasar bagi individu karena manfaat yang diberikan tidak akan mampu memberikan kehidupan yang layak di masa pensiun (Keown, 2011).

Regulasi tersebut juga diharapkan mampu secara berkala untuk dikontrol keberlangsungannya. Hal tersebut mengingat regulasi tersebut merupakan variabel kontrol yang dirasakan oleh pekerja dalam melakukan perencanaan keuangan hari tua. Griffin *et al.*, (2012) juga menemukan perlu adanya pendekatan untuk meningkatkan perilaku perencanaan lewat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan akan kontrol yang dimiliki. Peningkatan rasa percaya diri yang dilakukan pemerintah dapat mempertimbangkan adanya indikasi pengaruh yang kuat dari pengetahuan keuangan bagi individu untuk melakukan perencanaan pensiun. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan keuangan menjadi faktor yang mampu membantu individu dalam melakukan perencanaan pensiun (Clark *et al.*, 2012; Ibrahim *et al.*, 2012; Jamaludin, 2012). Temuan Prawitz dan Cohart (2014) menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki pengetahuan keuangan tidak hanya akan meningkatkan kepesertaan perencanaan pensiun, tetapi juga mampu membangun kepesertaan pada tabungan pribadi. Hal tersebut membantu pekerja untuk tidak menimbulkan utang (Prawitz dan Cohart, 2014). Dengan kata lain, Prawitz dan Cohart (2014) menjelaskan bahwa dengan pengetahuan keuangan yang cukup akan meningkatkan kepemilikan perencanaan keuangan jangka pendek (tabungan) dan perencanaan keuangan jangka panjang (perencanaan pensiun).

Ajzen (2006) menjelaskan bahwa perilaku, rujukan sosial yang dianggap penting juga memasukkan rujukan sosial yang berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu perilaku. Secara spesifik, dalam TPB, norma subjektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*) didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma-norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan individu tentang kesetujuan dan atau ketidaksetujuan orang lain maupun kelompok. Kesetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain tersebut adalah hal penting bagi individu dalam memandang suatu perilaku (*normative beliefs*). Hal tersebut kemudian menjadi sebuah motivasi individu untuk mematuhi rujukan dari orang lain atau kelompok tersebut (*motivation to comply*). Hasil ini sejalan dengan penelitian Griffin *et al.*, (2012). Seperti yang diperkirakan, perencanaan pensiun pada perempuan lebih sangat dipengaruhi oleh norma-norma subjektif tentang perilaku (Griffin *et al.*, 2012). Perempuan ditemukan lebih mungkin untuk melakukan perencanaan pensiun ketika rekan-rekan mereka dan orang lain yang menjadi rujukannya juga melakukannya (Griffin *et al.*, 2012).

Penelitian ini sejalan dengan temuan Ajzen (2006) tersebut. Penelitian Astuti dan Hartoyo (2013) juga menemukan bahwa keyakinan yang tinggi pada keluarga dan teman akan membuat mahasiswa mengikuti saran mereka untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua sedini mungkin. Norma-norma subjektif menjadi salah satu faktor selain kontrol perilaku yang dirasakan yang mampu membuat pekerja Kota Bogor memiliki perencanaan keuangan hari tua. Dengan kata lain, individu mempersepsikan bahwa rujukan keluarganya merekomendasikan untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua menjadikannya merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut.

Melihat hasil lainnya pada hubungan karakteristik demografi pekerja dengan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. Kepemilikan perencanaan keuangan hari

tua dapat ditunjukkan pada mereka yang memiliki jumlah tanggungan lebih banyak dengan usia di atas 30 tahun. Hsiao *et al.*, (2016) juga menemukan di Taiwan bahwa pada mereka yang berusia 40-49 tahun lah yang lebih memikirkan perencanaan keuangan hari tua dan menyadari bahwa tidak cukup untuk hanya bergantung pada manfaat sosial nasional untuk menutupi biaya pensiun hidup. Pekerja dengan karakteristik ini merupakan karakteristik yang sangat berpeluang untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua. Hal tersebut sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Jamaludin (2012). Variabel demografi, seperti jenis kelamin, usia, dan status perkawinan semua ditemukan sebagai prediktor yang signifikan dari individu untuk melakukan investasi pada tabungan pensiun (Jamaludin 2012). Karakteristik demografi tersebut juga menjadi pembeda kepercayaan individu dalam memilih tabungan pensiun sebagai salah satu investasi yang harus mereka miliki (Jamaludin 2012). Penelitian ini menemukan bahwa status pernikahan dan pendapatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mereka yang telah menikah menjadi sasaran pekerja Kota Bogor yang sesuai untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua. Pekerja Kota Bogor yang juga memiliki penghasilan yang lebih dari 9 juta rupiah juga merupakan sasaran dalam kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. Hasil ini sejalan dengan temuan Hsiao *et al.*, (2016), Joo dan Grable (2005), Li *et al.*, (1996) bahwa pada mereka yang penghasilannya lebih tinggi maka mereka akan lebih memiliki perencanaan keuangan hari tua dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan rendah. Hasil lain, mendukung bahwa menjadi tua dengan pendapatan lebih memiliki dampak yang signifikan pada manfaat pensiun. Ada hubungan positif antara usia dan status menikah dengan tabungan pensiun (Foster 1998).

PENUTUP

Kepemilikan perencanaan keuangan hari tua ternyata tidak dimiliki oleh seluruh pekerja Kota Bogor. Sebagian besar pekerja Kota Bogor yang memiliki perencanaan keuangan hari tua dengan memiliki tabungan. Sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan untuk menabung secara rutin dengan jumlah uang yang disisihkan kurang dari Rp1.000.000,-. Sementara itu, pada mereka yang tidak memiliki perencanaan keuangan hari tua, terbukti hal tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan keluarga dan pemerintah. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan gerakan menabung wajib dengan iuran yang ringan. Dengan adanya iuran yang ringan hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan keyakinan pekerja bahwa mereka mampu melakukan perencanaan keuangan hari tua. Di sisi lain, adanya iklan masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan keyakinan keluarga untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Iklan masyarakat tersebut diharapkan secara efektif dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan hari tua untuk memiliki hidup yang nyaman di masa tua. Pekerja yang dapat dijadikan sasaran untuk meningkatkan kepemilikannya terhadap perencanaan keuangan hari tua adalah mereka yang memiliki jumlah tanggungan lebih dari 1, berusia lebih dari 30 tahun, telah menikah, dan berpendapatan tinggi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sulitnya menemukan penelitian serupa yang mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai model TPB pada kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. Penelitian ini juga sulit mendapatkan partisipasi aktif pekerja Kota Bogor. Hal tersebut mengingat topik ini masih merupakan topik yang

sensitif untuk diteliti di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu melihat pengaruh lain yang dapat menjelaskan mengenai niat pekerja untuk memiliki perencanaan keuangan hari tua. Pengaruh tersebut dapat berupa pengetahuan keuangan, tingkat kesadaran, serta toleransi pekerja terhadap risiko. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan dengan metode lain yang mampu memperoleh partisipasi aktif lebih banyak dari pekerja yang ada. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman dan solusi yang tepat mengenai fenomena perencanaan keuangan hari tua.

DAFTAR RUJUKAN

- [BPJS Ketenagakerjaan] Badan Penyedia Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2014. Laporan Tahunan BPJS Tahun 2014
- [BPS Jawa Barat] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2015. Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Barat Februari 2015 No. 31/05/32/Th. XVII, 5 Mei 2015.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu. Diakses pada <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1904> pada 24 Januari 2017.
- [Taspen] Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. 2014. Laporan Tahunan PT Taspen 2014.
- Agnew JR, H Bateman, dan S Thorp. 2013. Financial literacy and retirement planning in Australia. *Numeracy Advancing Education in Quantitative Literacy*, 6 issue 2, artikel 7.
- Ajzen I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Volume 50: 179-211.
- Ajzen I. 2005. *Attitudes, Personality and Behavior*. 2nd Edition. Berkshire: McGraw-Hill Professional Publishing.
- Ajzen I. 2006. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. Accessed on <http://www.unix.oit.umass.edu/tpb.measurement.pdf>.
- Alfest, Lewis J. 2007. *Personal Financial Planning*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Anderson M, Y Li, F Bechhofer, D McCrone, dan R Stewart. 2000. Sooner rather than later? Younger and middle-aged adults preparing for retirement. *Aging and Society*, 20, 445-466.
- Astuti RN, Hartoyo. 2013. Pengaruh nilai, tingkat pengetahuan, dan sikap terhadap perencanaan keuangan hari tua. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 6(2): 109-118.
- Boisclair D, A Lusardi, PC Michaud. 2014. Financial literacy and retirement planning in Canada. *NBER Working Paper Series Number 20297*.
- Brahmana R, CH Puah, DT Hla, dan S Lestari. 2014. Financial literacy and retirement planning: Evidence from Malaysia. Research funded by UNIMAS Small Grant Scheme F01.
- Brucker E and K Leppel. 2013. Retirement Plans: Planners and Nonplanners. *Educational Gerontology*, 39: 1-11.
- Clark, RL, MS Morrill, dan SG Allen. 2012. The role of financial literacy in determining retirement plans. *Economic Inquiry*, 50(4).
- Conner M dan CJ Armitage. 1998. Extending the theory of planned behavior: A review of avenues for further research. *Journal of Applied Social Psychology*, 28, 1429-1464.

- Davis, K., & Hustvedt, G. (2012). It's a Matter of Control: Saving for Retirement. *International Review of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 248–261. Retrieved from http://irssh.com/yahoo_site_admin/assets/docs/25_IRSSH-354-V3N2.202201509.pdf
- Ebersole P dan P Hess. 1990. *Towards healthy aging: Human needs and nursing response*. St. Louis, MO: C. V. Mosby
- Ekerdt DJ, J Hackney, K Kosloski, and S DeViney. 2001. Eddies in the stream: The prevalence of uncertain plans for retirement. *Journal of Gerontology: Social Sciences*, 56B, S162–S170.
- Fishbein M and I Ajzen. 1975. Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Accessed on <http://people.umass.edu/aizen/fdana1975.html>
- Foster AC. 1998. Employee benefits in the United States, 1994-1995. *Compensation and Working Condition*, 56-51.
- Garman ET and RE Fergie. 1994. *Personal Finance*. Boston: Houghton Mifflin.
- Griffin B, D Loe, dan B Hesketh. 2012. Using proactivity, time discounting, and the theory of planned behavior to identify predictors of retirement planning. *Educational Gerontology*, 38: 877–889.
- Hagger MS dan NLD Chatzisarantis. 2005. First-and higher-order models of attitudes, normative influence, and perceived behavioral control in the theory of planned behavior. *British Journal of Social Psychology*, 44(4), 513–535.
- Hazembuller AT, BA Lombardi, dan JM Hogarth. 2007. Unlocking the risk-based pricing puzzle: Five keys to cutting credit card costs. *Consumer Interests Annual*, 53, 73-84.
- Hogg MA dan GM Vaughan. 2005 *Introduction to Social Psychology*. 4th Ed. Australia: Pearson Prentice Hall.
- Hsiao YJ, JT Chen, CF Liao. 2016. The relationship between financial literacy and retirement planning. *Journal of Management*, 33: 311-335.
- Ibrahim D, ZM Isa, dan N Ali. 2012. Malaysian savings behavior towards retirement planning. *International Conference on Economics Marketing and Management*, 28.
- Jamaludin, Nurasyikin. 2012. Individual retirement savings behaviour: evidence from malaysia. [tesis]. Australia: School of Accounting, Finance and Economics, Faculty of Business and Law, Edith Cowan University, Perth.
- Joo SH dan JE Grable. 2005. Employee education and the likelihood of having a retirement savings program. *Financial Counseling and Planning*, Volume 16 (1).
- Keown AJ. 2011. *Personal Finance : Turning Money into Wealth*. USA: Prentice Hall PTR.
- Li J, CP Montalto, dan LV Geistfeld. 1996. Determinants of financial adequacy for retirement. *Financial Counseling and Planning*, 7, 39-48.
- Madden TJ, PS Ellen, dan I Ajzen. 1992. A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 18(1), 3-9.
- Marshall VW, PJ Clarke, dan PJ Ballantyne. 2001. Instability in the retirement transition: effects on health and well-being in a Canadian study. *Research on Aging*, 23, 379-409.
- Mutran EJ, DC Reitzes, dan ME Fernandez. 1997. Factors that influence attitudes toward retirement. *Research on Aging*, 19, 251–273.
- Noone JH, C Stephens, dan FM Alpass. 2009. Preretirement planning and well-being in later life: A prospective study. *Research on Aging*, 31, 295–317.

- Prawitz AD dan J Cohart. 2014. Workplace financial education facilitates improvement in personal financial behaviors. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 25(1): 5-26.
- Reitzes DC dan EJ Mutran. 2004. The transition into retirement: stages and factors that influence retirement adjustment. *International Journal of Aging and Human Development*, 59, 63-84.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun.
- Rivis A dan P Sheeran. 2003. Social influences and the Theory of Planned Behavior: Evidence for a direct relationship between prototypes and young people's exercise behavior. *Journal Psychology dan Health*, 18(5), 567–583.
- Roberts JA dan E Jones. 2001. Money attitudes, credit card use, and compulsive buying among American college students. *Journal of Consumer Affairs*, 35(21), 213-240.
- Senduk S. 1999. *Designing Retirement Program*. Jakarta (ID): Elex Media Komputindo Company.
- Sulastri S, Hartoyo. 2014. Pengaruh dukungan sosial dan strategi nafkah terhadap kesejahteraan subjektif keluarga usia pensiun. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 7(2): 83-92.
- Topa G, JA Moriano, M Depolo, CM Alcover, dan JF Morales. 2009. Antecedents and consequences of retirement planning and decision-making: a meta-analysis and model. *Journal of Vocational Behavior*, 75, 38–55.
- Van Dam K., JDM Van der Vorst, dan BIJM van der Heijden. 2009. Employees' intentions to retire early: A case of planned behavior and anticipated work conditions. *Journal of Career Development*, 35(3), 265–289.